

TINJAUAN NILAI-NILAI SYARI'AH TERHADAP AGENCY THEORY

Oleh: Abd. Wahid Mahsuni

ABSTRAK

Konsep *Agency theory* memandang bahwa manajemen sebagai penerima kerja dari *principal* (pemilik) dan harus melaporkan aktivitas yang diberikan kepadanya, disamping itu *principal* sebagai pemberi kerja akan meminta kompensasi tertentu terhadap apa yang dilakukan oleh manajemen, laporan tersebut biasanya dituangkan dalam laporan keuangan. Di samping itu ada metafora lain dalam mendesain dan mengoperasikan organisasi dengan bentuk metafora amanah. Metafora ini mempunyai nuansa humanis dan transendental.

Kata Kunci: *Principal, agent, metafora amanah*

PENDAHULUAN

Agency theory metafora pada dua individu yaitu antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), di mana pada teori ini *principal* mendelegasikan wewenangnya pada agen, baik *principal* maupun agen dipandang sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang semata-mata termotivasi untuk memaksimalkan kepentingan pribadi masing-masing. Konsep *Agency theory* memandang bahwa manajemen sebagai penerima kerja dari *principal* (pemilik) dan harus melaporkan aktivitas yang diberikan kepadanya, di samping itu *principal* sebagai pemberi kerja akan meminta kompensasi tertentu terhadap apa yang dilakukan oleh manajemen.

Teori keagenan merupakan suatu teori deskriptif yang berusaha untuk menerangkan tindakan atau aksi dari pihak yang terlibat dalam hubungan kontrak dalam merubah metode pengukuran akuntansi yang dilakukan oleh para perusahaan maupun manajemen (Kiswara, 1999:5).

Akuntansi konvensional adalah merupakan cerminan dari kapitalisme yang memandang bahwa perusahaan berorientasi penuh pada pencapaian laba yang optimal, sehingga perusahaan melihat sesuatu sebagai suatu kesempatan untuk menambah kekayaan bagi perusahaan, sehingga sesuatu yang tidak menghasilkan keuntungan maka ditinggalkan begitu saja. Akuntansi konvensional (*positive accounting theory*) sendiri telah memberikan peluang untuk praktik yang dapat mewarnai konflik dalam teori keagenan. Hal ini terlihat bahwa *Agency theory* juga dengan semangat kapitalisme di mana *Agency theory* salah satu untuk mengurangi adanya konflik kepentingan, maka dilakukan kontrak antara *principal* yang maksimal, jadi akuntansi konvensional dan *Agency theory* merupakan produk yang dihasilkan dari ideologi kapitalisme.

Bertolak dari pemikiran di atas maka Triyuwanto (1997:18) memandang metafora lain dalam mendesain dan mengoperasikan organisasi dengan metafora amanah. Metafora ini mempunyai nuansa humanis dan transendental. Di mana “amanah” adalah sesuatu yang dipercayakan pada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan.

Selanjutnya Triyuwono (1997:18) memandang metafora amanah ini ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu

sendiri. Pemberi amanah dalam hal ini adalah Tuhan sang pencipta alam semesta. Dan dengan kekuasaan yang maha besat, tuhan menciptakan manusia sebagai wakilnya di bumi (kholifah fil ardh). Kata kholifah akan mengemban suatu pengertian bahwa seseorang yang telah diangkat sebagai kholifah akan mengemban suatu amanah yang harus dilakukan sesuai dengan keinginan pengutusnya. Rahardjo (1995) dalam Triyuwono (1997:19) mengartikan kholifah sebagai sebuah fungsi yang diemban oleh manusia berdasarkan amanah yang diterimanya dari Allah. Amanah itu pula intinya adalah tugas mengelola bumi secara bertanggung jawab, dengan menggunakan aksi yang telah dianugerahkan Allah kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut maka pemilik adalah sebagai pihak yang diberi amanah oleh Allah sebagai orang yang mempunyai dana sedangkan manajer adalah orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik untuk mengelola dananya (perusahaan). Oleh karena itu karena di sini yang berusaha adalah Allah maka baik pemilik (*principal*) maupun (*agent*) dalam mengelola organisasi harus sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah kepadanya.

IDEOLOGI KAPITALISME

Heilbroner (1991:8) dalam Setiabudi dan Triyuwono 2002:96) mengasumsikan bahwa hakekat kapitalisme sesungguhnya merujuk pada lembaga-lembaga dan relasi-relasi yang merupakan pembentuk perilaku, sementara logika kapitalisme mengacu terhadap sejumlah pola perubahan konfigurasional yang dibimbing dan dihasilkan dari inti di dalamnya. Kapitalisme yaitu penggunaan kekayaan dalam berbagai bentuk konkret, bukan sebagai tujuan itu sendiri, tetapi sebagai sarana mengakumulasi lebih banyak kekayaan (heilbroner, 1991) dalam Setiabudi dan Triyuwono 2002). Di dalam kapitalis kekayaan ada dalam benda-benda material secara temporer, sementara yang menjadi inti perkembangan capital sesungguhnya adalah kekuatan dan kekuasaannya untuk memperoleh lebih banyak lagi kekayaan. Sebenarnya capital sendiri juga membawa diskursus tentang capital ke dalam inti dari hubungan sosial dalam kapitalisme yaitu dominasi (Heilbroner 1991, Setiabudi dan Triyuwono 2002), sehingga akan memunculkan suatu kelas yang berorientasi capital dari dalam masyarakat sendiri ke suatu posisi yang berpengaruh (Heilbroner 1991, Setiabudi dan Triyuwono 2002). Di sini juga diingatkan bahwa bentuk dominasi yang terjadi sesungguhnya memiliki dua wajah (Heilbroner 1991, Setiabudi dan Triyuwono 2002), yaitu ketergantungan kaum papa di mana capital dapat menerapkan pengaruhnya dan masih terdapat kutub lainnya yang lebih bersifat psikologis berperilaku yaitu dorongan tanpa henti dan tanpa puas untuk terus mengakumulasi capital.

EKONOMI DAN TEORI AKUNTANSI KAPITALIS

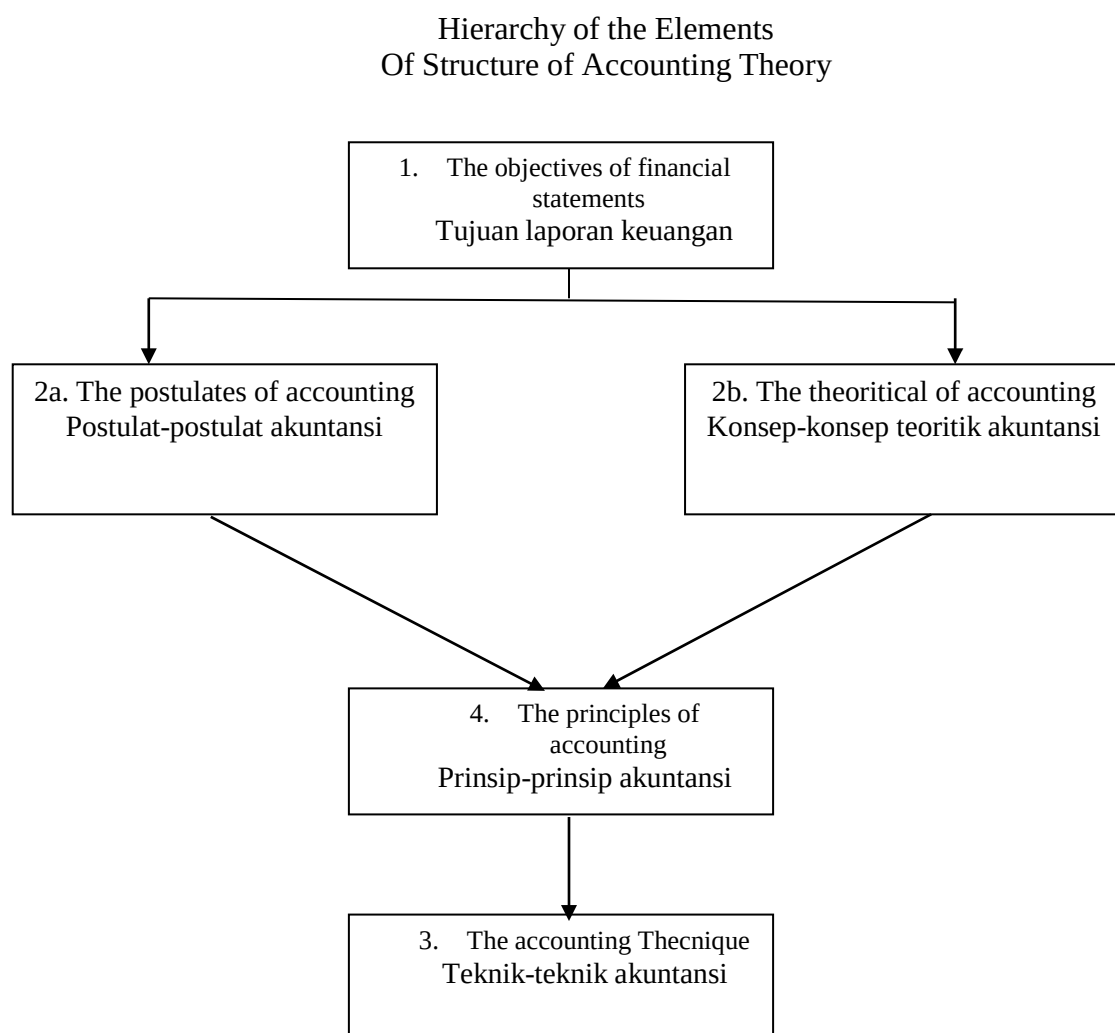
Menurut Harahap (2001:9-10) sistem ekonomi kapitalis diangun berdasarkan filsafat Yunani yang rasional sekuler ditandai dengan pengutamaan kepentingan pemilikan pribadi, materialisme, rasionalisme, liberalisme, sekularisme, ekonomi pasar, kompetisi dan lain sebagainya. Ternyata sistem ini telah banyak menghasilkan kemakmuran ekonomi sebagian masyarakat, tetapi pada saat yang sama meninggalkan persoalan yang besar yang belum dapat terpecahkan seperti degradasi lingkungan, dekadensi moral, ketimpangan pendapatan, ketimpangan pemilikan, hedonisme pemborosan dan sebagainya.

Sedangkan dari ekonomi kapitalis menurut Harahap (2001:10-11) lahir dari paham yang menganggap kemakmuran masyarakat hanya timbul jika kegiatan produksi diserahkan pada individu. Ide konsep ini terus berkembang dan mencari bentuk sampai saat ini. Menurut ideologi ini untuk mendapatkan kemakmuran masyarakat dibebaskan individu memiliki faktor produksi, mengolahnya dan memanfaatkannya untuk kepentingannya, yang dilaksanakan secara rasional dan pertimbangan ekonomi. Dengan demikian masyarakat akan

dapat menikmati kemajuan si kapitalis tadi melalui kegiatan produksi yang dihasilkannya, konsumsinya, serta kesempatan kerja yang ditimbulkannya. Dengan demikian pendapatan masyarakat meningkat, tabungan bertambah, dan akhirnya investasi bertambah. Ada lima ciri utama dari sistem ekonomi kapitalisme (1) dalam meningkatkan kekayaan, memaksimumkan produksi individu (2) kebebasan individu diberikan untuk mencapai kepuasan pribadi dan dimanaj secara pribadi (3) alokasi sumber yang ada diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan dan mekanisme kompetisi pasar (4) tidak diakui perlunya campur tangan pemerintah dalam mengatasi berbagai ketimpangan masyarakat dan (5) dengan memberikan inisiatif kepada individu dianggap otomatis akan memakmurkan seluruh masyarakat.

Akuntansi kapitalis didasarkan pada pemikiran rasional di mana kapitalis/pemilik modal diutamakan sehingga teori akuntansinya pun diarahkan pada kepentingan pemilik modal. Struktur teori akuntansi kapitalis didasarkan pada apa yang diinginkan si kapitalis, laporan dan informasi apa yang dapat memenuhi kebutuhan kepentingan kapitalis (Harahap, 2001:41).

Berikut adalah struktur dari teori akuntansi kapitalis



Sumber: Belkaoui (2000:170), Rosjidi (1999:145)

Dari hal tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan

Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan seperti yang dikutip Rosjidi (1999:116) dari APB Statement No. 4 diungkapkan bahwa tujuan dasar akuntansi dan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif dari entitas bisnis yang berguna bagi para pemakai informasi, terutama bagi para pemilik dan kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

2a. Postulat-postulat Akuntansi

Postulat akuntansi menurut Belkaoui (2000:171) adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, berterima umum berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan, menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi beroperasi.

Dalam postulat akuntansi menurut Rosyidi (1999:144-146) lihat juga Belkaoui (2000) terdiri dari 1) entitas akuntansi 2) kesinambungan 3) pengukuran dalam nilai uang 4) periode akuntansi

2b. Konsep-konsep Teoritis Akuntansi

Konsep teoritis akuntansi menurut Belkaoui (2000:171) adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, juga berterima umum berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan sifat entitas akuntansi yang beroperasi dalam ekonomi bebas yang dikarakteristikkan oleh kepemilikan pribadi terhadap kekayaan.

Dalam konsep teoritis akuntansi menurut Rosyidi (1999:144-147) lihat juga Belkaoui (2000) terdiri atas tiga teori (1) teori kepemilikan (*proprietary theory*) (2) teori entitas (*Entity theory*) (3) teori dana (*fund theory*).

3. Prinsip Akuntansi

Menurut Belkaoui (2000:171) adalah aturan keputusan umum, yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-- teknik akuntansi. Dalam prinsip akuntansi menurut Belkaoui (2000:178-189) terdiri atas beberapa prinsip:

1) Prinsip Kos

Menurut prinsip kos, kos perolehan (*acquisition cost*) atau kos historis merupakan dasar penilaian yang memadai untuk mengakui pemerolehan sembarang dan jasa, *expenses*, kos, dan ekuitas. Dengan kata lain, item dinilai dengan harga pertukaran pada saat barang tersebut dibeli dan dicatat dalam laporan keuangan pada nilai atau porsi amortisasi nilai barang

2) Prinsip Revenue

Prinsip *revenue* menspesifikasi : (a) sifat komponen-komponen *revenue* (b) pengukuran *revenue* (c) waktu pengukuran *revenue*

3) Prinsip penandingan

Prinsip penandingan menyatakan bahwa *expenses* harus diakui pada periode yang sama dengan *revenue*: yaitu *revenue* diakui dalam periode tertentu sesuai dengan prinsip *revenue*, dan *expenses* yang terkait kemudian diakui. Hubungan terbaik dapat dicapai ketika hubungan tersebut menggambarkan hubungan sebabakibat antara *cost* dan *revenue*

4) Prinsip objektivitas

Kegunaan informasi keuangan tergantung pada tingkat reliabilitas prosedur pengukuran yang digunakan. Karena menjamin reliabilitas maksimum adalah sangat sulit, akuntansi telah menggunakan prinsip objektivitas untuk menjustifikasi pemilihan prosedur pengukuran yang digunakan.

5) Prinsip konsistensi

Prinsip konsistensi menyatakan bahwa peristiwa ekonomi yang serupa seharusnya dicatat dan dilaporkan secara konsisten dari periode ke periode. Prinsip ini berimplikasi bahwa prosedur akuntansi yang sama akan diterapkan dalam item serupa sepanjang waktu.

6) Prinsip pengungkapan penuh

Terdapat konsensus umum dalam akuntansi bahwa terdapat pengungkapan dan akuntansi yang penuh (*full*) wajar (*fair*) dan cukup (*adequate*)

7) Prinsip konservatisme

Prinsip konservatisme merupakan prinsip pengecualian atau modifikasi dalam artian bahwa prinsip tersebut bertindak sebagai batasan untuk penyajian data akuntansi yang relevan dan reliabel. Prinsip konservatisme menyatakan bahwa ketika memilih di antara dua atau lebih teknik akuntansi yang dapat diterima, maka preferensinya adalah memilih yang paling kecil dampaknya terhadap ekuitas pemegang saham.

8) Prinsip materialitas

Seperti halnya konservatisme, prinsip materialisme merupakan prinsip pengecualian atau modifikasi. Prinsip ini menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa yang tidak memiliki dampak ekonomi signifikan dapat diatasi dengan cara yang paling tepat, apakah transaksi dan peristiwa tersebut sesuai dengan prinsip berterima umum atau tidak dan tidak perlu diungkapkan.

9) Prinsip keseragaman dan komparabilitas

Prinsip konsistensi mengacu pada penggunaan prosedur yang sama untuk item-item yang terkait dengan perusahaan tertentu antara waktu; prinsip keseragaman merujuk pada penggunaan prosedur yang sama oleh perusahaan yang berbeda.

4. Teknik-teknik Akuntansi

Teknik akuntansi adalah ketentuan yang bersifat spesifik dan teknis, yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi, untuk memperhitungkan dan memperlihatkan transaksi yang terjadi di perusahaan (Rosjidi, 1999:148).

Positive Accounting Theory

Menurut Belkaoui (2001:108-109) tujuan utama pendekatan akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan standar oleh manajemen dengan menganalisis biaya dan manfaat ungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Teori positif

didasarkan pada proporsi bahwa manajer pemegang saham dan regulator/politisi adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka yang secara langsung terkait dengan kompetensi mereka, sehingga terkait dengan kemakmuran mereka. Kemudian dalam kenyataannya cita-cita utama pendekatan positif adalah untuk mengembangkan hipotesis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dunia praktrek akuntansi dan untuk menguji validitas hipotesis tersebut secara empiris: (1) untuk meningkatkan reliabilitas prediksi berdasarkan serangkaian angka akuntansi rata-rata yang diobservasi sepanjang tren yang dipandang terbaik atau normal oleh manajemen (2) Untuk mengurangi ketidakpastian yang diakibatkan oleh fluktuasi angka *income* secara umum dan pengurangan resiko sistematis secara khusus dengan mengurangi kovariansi return perusahaan dengan return pasar.

Masalah utama dalam teori positif adalah untuk menentukan bagaimana prosedur akuntansi mempengaruhi aliran kas dan dengan demikian utilitas manajemen fungsi untuk memperoleh pencerahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan manajemen prosedur akuntansi. Resolusi terhadap masalah tersebut dipandu oleh beberapa asumsi teoritis (1) teori agensi mungkin telah dimulai dengan menekankan pada kontrak sukarela yang muncul antara berbagai pihak organisasional sebagai solusi yang efisien terhadap konflik-konflik kepentingan ini. Teori tersebut mengembangkan pandangan tentang perusahaan sebagai sebuah kontrak/nexus of contracts, dengan pernyataan Jensen dan Meckling bahwa perusahaan adalah fiksi legal yang melayani sebuah rangkaian seperangkat hubungan kontrak di antara individu. Fama memperluas pandangan “rangkai kontrak” ini dengan memasukkan pasar modal dan pasar bagi tenaga kerja manajemen; (2) Berkaitan dengan perspektif tentang perusahaan sebagai rangkaian kontrak “*contracting cost theory*” memandang peranan informasi akuntansi sebagai alat pemantauan dan pemaksaan kontra-kontrak ini untuk mengurangi biaya keagenan dari konflik kepentingan tertentu. Satu konflik yang mungkin adalah konflik kepentingan antara pemberi pinjaman dan pemegang saham perusahaan, dalam kasus seperti itu keputusan yang menguntungkan bagi pemegang saham tidak selalu merupakan yang terbaik bagi pemberi pinjaman. Hal ini mungkin menyebabkan perjanjian pemberian pinjaman menghendaki adanya ketentuan tentang aturan pengukuran untuk menghitung angka-angka akuntansi dengan tujuan untuk melindungi perjanjian pinjaman. Kesepakatan lain yang mungkin adalah mewajibkan penggunaan angka-angka akuntansi dari laporan keuangan auditan untuk memantau perjanjian tentang kesepakatan yang meliputi kontrak kompensasi manajemen dan perusahaan secara hukum. Sehingga teori kontrak perjanjian mengasumsikan bahwa metode akuntansi dipilih sebagai bagian dari proses maksimalisasi kemakmuran.

Selanjutnya Belkaoui (2001:109-110) menekankan masalah utama pendekatan positif terletak pada penentuan faktor-faktor apakah yang mungkin mempengaruhi pilihan yang optimum, dengan dipandu oleh asumsi teori agensi dan teori kontrak perjanjian. Pilihan akuntansi tergantung pada variabel-variabel yang mempresentasikan insentif manajemen untuk memilih metode akuntansi dengan rencana bonus, kontrak utang dan proses politis. Sebagai akibatnya tiga hipotesis dihasilkan di mana hipotesis-hipotesis ini secara umum dinyatakan dalam beberapa perilaku oportunistik manajer (1) *bonus plan hypothesis* menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan income yang dilaporkan pada periode berjalan. Alasannya adalah tindakan seperti itu mungkin akan meningkatkan persentase nilai bonus jika tidak ada penyesuaian untuk metode yang dipilih (2) *debt equity hypothesis* menyatakan bahwa semakin tinggi rasio utang/ekuitas suatu perusahaan, yang ekuivalen dengan semakin dekatnya (yaitu semakin ketat) perusahaan terhadap kendala-kendaa dalam perjanjian utang dan semakin besar

probabilitas pelanggaran perjanjian dan terjadinya kos kemacetan teknis, semakin mungkin manajer untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan income, (3) *political cost hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan besar lebih mungkin untuk menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi profit yang dilaporkan dari pada perusahaan kecil.

Agency theory

Agency theory muncul sekitar tahun 1970 di Amerika Serikat, sebenarnya lahirnya *Agency theory* ini tidak terlepas dari pemisahan perusahaan antara kepemilikan dan perusahaan (*entity Theory*) atau antara pemilik dan manajer./ Dengan semakin besarnya perusahaan maka pemilik tentunya tidak dapat secara intensif dalam mengelola perusahaannya, sehingga pengelolaannya diserahkan pada manajer. Dalam *Agency theory* terdapat dua pihak yang melakukan kontrak yaitu *agent* (manajer) dan *principal* (pemilik), di mana kontrak tersebut dapat berupa: (1) kontrak kerja dan (2) kontrak pinjaman.

Kontrak kerja dilakukan oleh pemilik perusahaan dan top manajer perusahaan, sedangkan kontrak pinjaman dilakukan oleh manajer perusahaan dan pemberi pinjaman. Salah satu pihak dalam kontrak disebut *principal* dan pihak lainnya disebut *agent*. Contohnya dalam kontrak pinjaman, pemberi pinjaman sebagai *principal* dan manajer perusahaan sebagai *agent*. Sedangkan dalam kontrak kerja pemilik perusahaan merupakan *principal* dan top manajemen sebagai *agent* yang dibayar untuk menjalankan kepentingan pemilik perusahaan. Teori mengenai hubungan antara *principal* dan *agent* ini sering disebut teori agensi (*Agency theory*) (Surifah, 1999:72).

Sedangkan Jansen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan peragenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih personal (*principal*) menyewa/mengikutsertakan person yang lainnya (*agent*) untuk menjalankan tugas atas kepentingan *principal* termasuk wewenang dalam pengambilan suatu keputusan. Jika masing-masing kelompok yang berhubungan dengan memaksimalkan utility mereka maka sangat beralasan jika *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan teraik *principal*.

Wolk dan tearney (1996:89) dalam Surifah (1999:72) menjelaskan bahwa dalam *Agency theory* perusahaan digambarkan sebagai locus (titik temu) hubungan keagenan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) dan berusaha memberi pemahaman perilaku organisasional dengan mengungkapkan bagaimana pihak-pihak yang terlihat dalam hubungan keagenan dalam perusahaan berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka.

Dalam *Agency theory* ini sebenarnya rentan terhadap terjadinya penyelewengan, di mana manajer berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya pihak lain. Perilaku ini biasa disebut sebagai keterbatasan rasional (*bounded rationality*) dan manajer perilaku ini biasa disebut sebagai keterbatasan rasional (*bounded rationality*) dan manajer cenderung tidak menyukai resiko (*risk averse*) (Wahidahwati, 2001:1086). Sedangkan jensen dan Meckling (1976) dalam Wahidahwati (2001:1086) menyatakan bahwa agency problem akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya dan sudah tidak berdasar maksimalisasi nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi pengelola dengan fungsi kepemilikan. Manajemen tidak menanggung resiko atas kesalahan dalam pengambilan keputusan, resiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham. Oleh karena itu manajemen cenderung melakukan pengeluaran yang bersifat konsumtif untuk kepentingan pribadinya seperti peningkatan gaji dan status.

Selanjutnya Surifah (2000:1086) menyatakan bahwa penyebab lain konflik antara manajer dengan pemegang saham adalah keputusan pendanaan. Para pemegang saham hanya peduli terhadap resiko sistematis dari saham perusahaan, karena mereka melakukan investasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Namun manajer sebaliknya lebih peduli pada resiko perusahaan secara keseluruhan.

Untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh *agent* dan menjaga kekayaan yang ada dalam otoritas *agent* dan *agent* dapat bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak *principal* sebagai berikut:

1. Ancaman pengambil alihan. Di mana dalam hal ini pihak manajemen yang diberi otoritas dalam pengambilan keputusan sebagai wakil dari *principal* tidak bisa berbuat (dalam hal pengambilan keputusan) sesuai dengan kepentingan terbaik dari *principal* maka pihak *principal* dapat melakukan pengambil alihan wewenang yang telah diberikannya kepada *agent*.
2. Ancaman pemecatan. Pemecatan dapat dilakukan oleh *principal* jika dengan sengaja *principal* mengetahui bahwa kekayaan yang telah didelegasikan kepada *agent* secara sengaja telah didisgirkan tidak pada kepentingannya yang terbaik bagi *principal*. Kebijakan ini hampir sama dengan kebijakan pengambil alihan di atas.
3. Program insentif dengan berdasarkan prestasi kerja *agent* dalam hal pelaksanaan kewajibannya terhadap *principal*. Program ini dapat berupa finansial atau non finansial (Weston & Brigham, 1994).

Dari ketiga hal di atas maka kebijakan yang paling banyak dianut oleh *principal* dalam hal berkaitan dengan tindakannya tersebut adalah dengan program insentif untuk penilaian prestasi kerja disertai peningkatan aktivitas monitoring. Hal ini dikarenakan *agent* mempunyai keleluasaan dalam hal penentuan kebijakan yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam program insentif, maka *principal* mengadakan pengeluaran yang bertujuan untuk memonitoring penyimpangan yang dilakukan oleh *agent*. Dan dengan adanya aktivitas monitoring ini tentunya tidak terlepas dari biaya, biaya ini biasa disebut dengan *agency cost*.

Agency Cost

Agency Cost didefinisikan oleh Weston dan Brigham (1994) sebagai biaya yang berkaitan dengan pemantauan tindakan manajemen guna menjamin tindakan tersebut konsistensi dengan kesepakatan kontrak antar manajer, pemegang saham (*shareholder*) dan kreditor expenditures yang dikeluarkan oleh *agent* serta monitoring expenditures yang dilakukan oleh *principal*. Biaya-biaya tersebut (*agency cost*) merupakan biaya yang ditanggung oleh *principal*, alasan yang mendasarinya adalah bahwa *principal* yang merupakan pemilik sumber dana mengharapkan bahwa jumlah dana yang ada dalam *agency cost* itu masih lebih sedikit daripada yang akan ditimbulkan jika *agent* secara leluasa memaksimalkan kepentingannya tanpa tindakan preventif tersebut.

Agency cost dibagi menjadi dua:

1) Agency Cost of Equity

Merupakan suatu hasil dari pengurangan nilai perusahaan (*reduction in firm's value*) akibat dari tindakan manajemen sebagai *agent* yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan *shareholder*. Dalam hubungannya dengan *agency cost of equity*, insentif merupakan penting dari perilaku kehidupan manusia dengan hubungan keagenan.

2) Agency Cost of Debt

Agency of debt berkaitan dengan masalah hutang (*issues of debts*), berkembang sejalan dengan adanya resiko hutang. Konflik kepentingan antara *shareholder* atau manajer dengan *debt holder* ini dikarenakan dalam hal peminjaman dana pada kreditor dengan suku bunga didasarkan pada (a) tingkat resiko dari aktiva perusahaan yang ada (b) struktur modal saat ini (yaitu jumlah pembiayaan yang berasal dari hutang) (c) perkiraan atas resiko penambahan aktiva di masa yang akan datang (Weston dan Brigham, 1994).

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang menentukan tingkat resiko arus kas perusahaan yang sangat jelas mempengaruhi keamanan hutangnya. Berdasarkan faktor tersebut kreditor menentukan tingkat pengembalian yang disyaratkan, yaitu biaya dari hutang perusahaan tersebut. *Agency cost of debt* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bond holder dalam kaitannya dengan pemberian pinjaman, di mana *shareholder* melalui manajemen dapat melakukan tindakan yang merugikan kepentingan kreditor. *Agency cost of debt* ini merupakan nilai kuantitatif dari batasan atau tindakan yang diambil oleh pihak *bondholder* agar pihak manajemen tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan kreditor.

Hubungan *principal* dan *agent* yang berkaitan dengan akuntansi keuangan karena kontak antara keduanya sering berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa peneliti bahwa angka akuntansi merupakan bagian integral dari kontrak formal dan informasi perusahaan (Surifah, 1999:73).

Jenden dan Murphy (1990) dan Lambert dan Larcker (1987) dalam Healy dan Palepu (1993) yang dikutip Surifah (1999:73) menyatakan bahwa sebagian besar penentuan kompensasi eksekutif adalah laba. Warner, et.al (1988) dan Weisbach (1988) dalam Healy dan Palepu (1993) yang dikutip Surifah (1999:73) menunjukkan bahwa kemungkinan besar perusahaan akan mengganti CEO nya apabila kinerja laba perusahaan jelek, DeAngelo (1988:1990) dalam Healy dan Palepu (1993) yang dikutip Surifah (1999:73) mencatat bahwa permainan angka akuntansi yang dilaporkan berperan signifikan sebagai *proxy* (wakil) ketidaksepakatan manajer dan *shareholder*. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa kinerja laba yang jelek dan hasil saham yang turun meningkatkan ancaman pengambilalihan perubahan kepemimpinan manajemen. Watts dan Simmerman (1986) dalam Surifah (1999:73) menyatakan manajer akan mempunyai dorongan untuk mengubah laporan laba jika dalam membuat keputusan manajer bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Untuk itu manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi yang lebih mudah untuk dipahami, diinterpretasikan dan lebih bermanfaat bagi pemakaiannya untuk pembuatan keputusan (Suparno, 1999:70).

EKONOMI ISLAM

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bekerja optimis, kreatif, dinamis, dan inovatif. Ajaran ini dimaksudkan agar umat Islam selalu dapat menyesuaikan diri dengan percepatan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan ajaran tersebut Islam telah menjadi suatu agama yang memiliki kekuatan dinamis dalam dunia modern ini (Muhammad, 2002:64).

Di samping itu juga mempunyai perbedaan dengan kapitalis seperti yang dikemukakan oleh Tajeri (2001) dalam Harahap (2001:28) yaitu:

1. Islam menggunakan sistem kepemilikan multi-facet. Kepemilikan tidak sepenuhnya milik pribadi. Menurut beliau Islam menyatakan bahwa kepemilikan kekayaan adalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah *trustee*, sehingga penggunaannya

tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada keputusan pribadi, tetapi harus memperhitungkan kepentingan masyarakat dan alam sekitarnya sesuai dengan aturan Allah swt. Ada multi level kepemilikan: kepemilikan pribadi, kepemilikan sosial, dan kepemilikan negara. Dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 284 disebutkan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah kepunyaan Allah.

2. Islam membenarkan kebebasan pribadi, tetapi ada batasnya. Kebebasan dibatasi oleh kepentingan orang lain dan kepentingan agama. Semua aktivitas harus memiliki filter moral. Kehidupan material tidak cukup, juga harus memperhatikan kehidupan spiritual dan semua diatur oleh syari'at
3. Islam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh manusia, bukan hanya keadilan atau kesejahteraan individual. Ukuran kesejahteraan dan keadilan tidak ditentukan oleh individu, pemerintah atau siapapun, tetapi ditentukan oleh Allah swt. Islam menganggap Allah selaku pencipta manusia dan seluruh alam ini lebih mengetahui sifat dan keinginan dari manusia sendiri dan lebih mengetahui cara terbaik untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dari hal tersebut maka Islam adalah agama yang sangat memperhatikan pembangunan ekonomi namun dengan menempatkan pembangunan umat manusia sebagai masalah yang lebih penting dan lebih besar. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Di samping itu pembangunan adalah aktivitas yang multidimensial, semua usaha harus diarahkan kepada keseimbangan dari berbagai faktor dan tidak ada ketimpangan diantaranya atau harus sesuai dengan kaidah Al- qur'an dan Assunnah.

Organisasi dalam Islam (Metafora Amanah)

Kalau kita melihat organisasi saat ini maka seolah-olah manusia bergerak seperti mesin, karena organisasi yang baik hanya dilihat dari kinerjanya yaitu yang efisien dan efektif. Sehingga di sini manusia seperti kurang diperhatikan atau bisa disebut kurang dimanusiakan, hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Morgan (1986) dalam Triuwono (2000:236-237) yaitu: Konsekwensi-konsekwensi yang tak terantisipasi dan tak diinginkan ketika kepentingan-kepentingan mereka yang bekerja dalam organisasi tersebut lebih didahulukan ketimbang tujuan-tujuan organisasi yang seharusnya dicapai dan itu kemungkinan tidak memanusiakan para karyawan di organisasi itu.

Dengan memperhatikan hal tersebut tampak nyata bahwa karyawan dalam organisasi hanya dipandang sebagai orang yang hanya diperintah, guna mencapai tujuan organisasi yang dalam hal ini adalah maksimalisasi laba.

Maksimalisasi laba dan perilaku yang mekanistik menjadi suatu hal yang dominan dalam kehidupan modern saat ini, atau bahkan akhirnya menjadi logosentrisme, yaitu sistem pola berfikir yang mengklaim adanya legitimasi dengan referensi kebenaran universal dan eksternal (Rosenau, 1992) dan Triuwono (1997:15). Artinya maksimasi laba dan perilaku mekanik adalah suatu bentuk kebenaran yang dapat dijadikan referensi yang sah untuk berperilaku dalam dunia bisnis.

Dari penjelasan di atas maka Triuwono melihat metafora lain untuk mendesain dan mengoperasikan organisasi adalah metafora amanah. Menurut Triuwono (1997:18).

“amanah adalah sesuatu yang dipercayakan pada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keahlian yang mengamanahkan. Ini artinya pihak yang mendapat amanah tidak memiliki kewajiban penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang

diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah”.

Selanjutnya Triyuwono (1997:18) melihat bahwa metafora amanah penting yang harus diperhatikan yaitu: pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah dalam hal ini adalah Tuhan sang Pencipta alam semesta.

Dalam bentuk yang lebih operasional Triyuwono (1997:24) melihat metafora amanah bisa diturunkan menjadi metafora “zakat” atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (a zakat orientasinya tidak lagi *profit oriented* atau *stakeholders oriented* (Triyuwono (1995 dalam Triyuwono 1997:25). Dengan orientasi zakat maka perusahaan berusaha untuk mencapai angka pembayaran zakat yang tinggi, berarti di sini yang menjadi ukuran kinerja perusahaan adalah masalah pembayaran zakatnya.

Selanjutnya penggunaan metafora zakat untuk menciptakan realitas organisasi menurut Triyuwono (1997:25) mengandung beberapa makna sebagai berikut:

- a. Ada transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat
- b. Karena yang menjadi tujuan adalah zakat, maka segala bentuk operasi perusahaan harus tunduk pada aturan main (*rules of game*) yang ditetapkan dalam syari’ah
- c. Zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik (*egoistic selfish*) dan Altruistik/sosial. (Altruistik) mementingkan lebih dulu kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Karakter egoistik menimbulkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai/syariah), kemudian sebagian dari laba (dan kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat.
- d. Zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan (duniawi dan suci). Ia (zakat) sebagai jembatan memberikan kesadaran ontologis bagi diri manusia bahwa segala bentuk kegiatan profan selalu berkait erat dengan kedudukan manusia di hadapan Tuhan kelak di akhirat..

Dengan menggunakan metafora zakat sebenarnya organisasi bisnis akan lebih ideal yang implikasinya adalah bahwa semua perangkat organisasi akan disusun sedemikian rupa sehingga benar-benar merefleksikan zakat sebagai metafora.

Konsep Kepemilikan dalam Islam

Dengan ditemukannya aljabar maka berdampak pada dunia bisnis dengan interpretasi yang dilakukan oleh Abul Wafa yaitu tentang suatu solusi negatif terhadap pengurangan yang diterapkan sebagai utang atau debt. Lieber pada abad ke 10 telah melihat peraturan judicial yang mengatur bahwa dua orang partner yang bergabung dalam satu usaha harus mencatat seluruh penjualan dan pembelian, keuntungan dan kerugian, serta kewajiban yang ada (Setiabudi dan Triyuwono, 2002:137). Hal ini merujuk pada ayat qur’an sebagai dasar hukum tertinggi mencatat wahyu Allah yang memerintahkan pencatatan atas transaksi utang piutang (Q.S. al-baqarah ayat 282). Gabungan dua bagian dari aqidah (credo) Islam menunjukkan watak ini, yaitu monoteisme eksatologis. Dasar hukum Islam adalah al-qur’an dan sunnah Rasul. Keduanya merupakan nas atau kepastian tuntutan hidup muslim. Sumber orisinal tersebut tercermin dalam tindakan dan pemikiran manusia (ijtihad), konsensus kolektif (ijma’), pemikiran analogis individu (qiyas) serta disempurnakan sampai batas tertentu dan sebagai tambahan oleh rasa kemaslahatan umum atau adat istiadat setempat atau kondisi-kondisi yang pencantumannya tidak melanggar dogma (Setiabudi dan Triyuwono, 2002:141).

Metafora amanah di mana seseorang yang memiliki suatu barang pada hakikatnya memperoleh suatu titipan yang diamanatkan kepadanya untuk dimanfaatkan sebagik-baiknya. Kepemilikan sebagai hasil kerja seseorang dan bentuknya yang disadari olehnya, dianggap sebagai hal yang natural dan logis. Manusia dalam kehidupan sosial yang ada, memiliki klaim kepemilikan, baik yang bersifat individu maupun kolektif. Dalam hukum Islam terdapat dua bentuk kepemilikan yaitu kepemilikan masyarakat dan kepemilikan kolektif yang belum direalisasi sebagai milik individu seperti yang dinyatakan dalam salah satu hadits. “kepemilikan manusia berbagi dalam tiga barang: api, air, dan padang rumput” menjadi pemilik kekayaan terseut tidak begitu saja menjadi halal pula kecuali telah dikeluarkan bagian hak kolektifnya dari pemilikan individu pada kerangka etis keseimbangan di mana dalam hak seseorang atas kekayaan secara bersama terselip pula secara azasi hak orang lain yaitu dalam bentuk zakat yaitu bentuk representasi asas keseimbangan kepemilikan dalam Islam.

Dalam hal ini sekurang-kurangnya akan memuat fungsi pembatas atas hak milik bila hal tersebut telah mencapai sejumlah kekayaan tertentu setara dengan sejumlah emas dan instrumen pembatasnya adalah zakat, yang besarnya didasarkan pada persentase tertentu yang memenuhi hisab.

KESIMPULAN

Agency Theori adalah teori yang berkiblat akuntansi konvensional sehingga *agency theory* kurang fleksibel karena hanya berhubungan antara *principal* dan *agent*. Untuk itu perlu adanya peninjauan nilai-nilai *Agency theory* dengan nilai-nilai syari'ah yang telah membawa atau melahirkan realitas organisasi yang baru, di mana realitas organisasi yang diambil terseut bereda dengan realitas organisasi yang ada sebelumnya. Dalam pengembangan *agency theory* maka asumsi dasar dalam pembentuk dan pengembangan teorinya berpijak pada pihak-pihak yang terlibat dalam *agency relationship* diperspektifkan sebagai individu yang selalu mengejar kepentingan masing-masing berusaha memaksimalkan utilitasnya.

Untuk melihat nilai-nilai *Agency theory* dengan nilai-nilai syari'ah maka lebih menekankan pada pembenahan mekanisme kontrol di mana dalam *Agency theory* pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan diperspektifkan sebagai individu yang pada hakekatnya adalah merupakan khalifatullah fil ardh. Dengan kholifatullah fil ardh maka dalam memandang organisasi adalah menggunakan organisasi dalam metafora amanah sehingga hubungan dalam keagenan bukan hanya antara *principal* dan agen tetapi juga Tuhan sebagai pemberi amanah.

KEPUSTAKAAN

Belkaoui, Ahmed Riahi. 2000. *Teori Akuntansi Jilid 1*, Jakarta: Salemba Empat

Belkaoui, Ahmed Riahi. 2001. *Teori Akuntansi Jilid 2*, Jakarta: Salemba Empat

- Haahap, Sofyan Ayafri, 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum Indonesia.
- Jensen. Michael C and William H. Meckling. 1990. *Theori of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership structure. The Modern Theory of Finance*. Smith Jr. and Clifford W. Second Edition.
- Kiswara, Endang,. 1999. *Artikel Media Akuntansi No. 34 Tahun VI April: Teori Keagenan (Agency theory). Wujud Kepedulian pada Makna Informatif Pengungkapan Laporan Keuangan*.
- Muhammad, 2002. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat
- Rosjidi, 1999. *Teori Akuntansi*, Jakarta: LPFE UI
- Setiabudi, Hendru Y dan Triyuwono, Iwan, 2002. *Akuntansi Ekuitas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surifah, 1999. Kajian Bisnis 17 Mei – September. *Informasi Asimetri dan Pengaruh Manajemen terhadap Laporan Keuangan dalam Perspektif Agency Theori*.
- Supomo, Bambang, 1999. *Dampak Kompensasi Manajemen terhadap Kebijakan Akuntansi Sebuah Tinjauan Umum hasil Penelitian Empiris*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol I. Nomor 1 April 1999.
- Triyuwono, Iwan, 1997. *JAAI Volume I (hal 3-46). Akuntansi Syari'ah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah*.
- Wahidahwati, 2001. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif Agency theory*, Symposium Nasional Akuntansi IV.
- Weston, J. Freed and Eugene. F. Brigham. 19994. *Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta, Erlangga.